

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Ketimpangan ekonomi menjadi salah satu isu penting yang sering dibahas dalam konteks pembangunan daerah. Ketimpangan ekonomi terlihat jelas di berbagai aspek perekonomian, termasuk pendapatan, akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, serta peluang ekonomi yang adil. Ketimpangan ekonomi mengacu pada ketimpangan distribusi pendapatan dan peluang antara berbagai kelompok dalam masyarakat yang mengakibatkan kesenjangan masyarakat berpenghasilan tinggi dan berpenghasilan rendah.

Ketimpangan ekonomi merupakan perbedaan kemakmuran kondisi perekonomian di dalam masyarakat suatu wilayah. Ketimpangan ekonomi terjadi karena adanya perbedaan pendapatan (Caesarisma, 2023). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), indeks gini merupakan salah satu indikator untuk mengukur ketimpangan ekonomi. Indeks Gini adalah ukuran ketimpangan agregat yang angkanya berkisar antara nol hingga satu. Fenomena ketimpangan ini telah menjadi salah satu tantangan utama dalam memastikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di Jawa Barat.

Provinsi Jawa Barat terletak di posisi strategis di pulau Jawa, kaya akan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM), serta memiliki infrastruktur yang berpotensi besar. Terdiri dari 18 kabupaten dan 9 kota, provinsi ini dibagi menjadi 6 wilayah pengembangan yang bertujuan untuk

mendorong pertumbuhan di berbagai bidang. Selain itu, pengembangan wilayah ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pembangunan serta mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah (Wangsaatmaja, 2023).

Provinsi Jawa Barat merupakan daerah dengan penduduk terbesar yang berjumlah 49.306,8 ribu jiwa pada tahun 2023 (17,78% penduduk Indonesia). Terdapat enam wilayah pengembangan (WP) berdasarkan dokumen RPJMD 2018-2023 dan RTRW 2009-2029 yang tertuang dalam pergub Jabar (2010) yaitu diantaranya: Bodebekpunjur (terdiri dari wilayah Bogor, Kota Depok, Bekasi, Kota Bekasi, Kota Bogor, dan sebagian Cianjur), Purwasuka (mencakup daerah Purwakarta, Subang, dan Karawang), Ciayumajakuning (beranggotakan Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Sumedang, dan Kota Cirebon), Priangan Timur-Pangandaran (meliputi Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, dan Pangandaran), Sukabumi dan sekitarnya (mempunyai anggota Sukabumi, Kota Sukabumi, dan Cianjur), Kawasan Khusus Cekungan Bandung (meliputi daerah Bandung, Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Bandung, dan sebagian Sumedang) (Noviyanti et al., 2020).

Provinsi Jawa Barat menghadapi tantangan besar dalam pembangunan ekonomi, ditandai dengan jumlah penduduk yang besar dan berkembang pesatnya pusat-pusat industri, khususnya di Karawang, Bogor, dan Purwakarta. Provinsi ini memainkan peran strategis dalam perekonomian nasional Indonesia dan memiliki PLTA yang besar seperti Jatiluhur. Selain

itu, juga menarik wisatawan domestik dan internasional seperti pantai Pelabuhan Ratu, dan Pangandaran. Pusat perbelanjaan di Bandung, dan situs budaya seperti Kampung Naga di Tasikmalaya dan Kampung Dukuh di Ciamis. Meski mempunyai potensi yang melimpah, Jawa Barat masih berjuang menghadapi ketimpangan ekonomi dan pencemaran lingkungan, terutama di wilayah seperti Tasikmalaya dan Sungai Citarum (Firmansyah, 2021).

Paradigma pembangunan baru menurut Rustiadi et al (2009) menyatakan bahwa pembangunan harus diarahkan pada terjadinya pemerataan (*equity*), pertumbuhan (*eficiency*), dan keberlanjutan (*sustainability*). Pemerataan tidak berarti pembangunan yang seragam di setiap daerah, melainkan upaya untuk memanfaatkan potensi unik masing-masing daerah. Hal ini bertujuan agar setiap daerah dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi masyarakat di seluruh wilayah (Noviyanti et al., 2020).

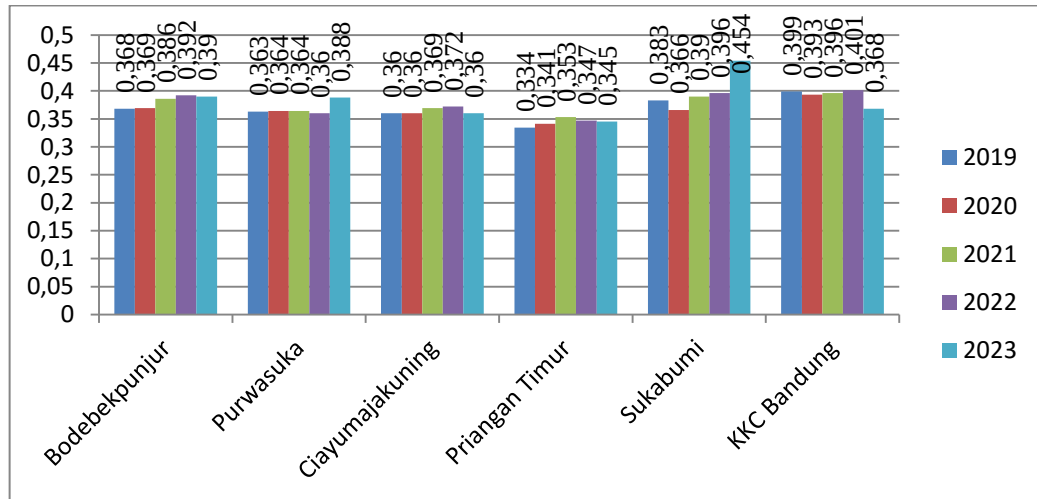
Berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Jawa Barat terbaru menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif, berkelanjutan, dan berbasis inovasi adalah tujuan utama dalam pembangunan Provinsi Jawa Barat. Untuk mencapai hal tersebut, yaitu fokus pada peningkatan kualitas pertumbuhan yang disertai dengan upaya pemerataan pendapatan melalui berbagai program dan kebijakan. Selain itu, harus melakukan diversifikasi ekonomi terutama dengan mengembangkan sektor-sektor baru seperti industri kreatif dan teknologi informasi, serta

memperkuat kemitraan publik-swasta, akan menciptakan peluang yang lebih luas bagi masyarakat dan mendorong inovasi. Selain itu, investasi yang signifikan dalam peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan akan menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan siap untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang (BAPPEDA Jabar, 2019).

Namun, pada kenyataannya Jawa Barat termasuk salah satu provinsi dengan angka gini ratio yang berada di atas rata-rata nasional serta rata-rata provinsi lainnya di pulau Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi di Jawa Barat lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional. Tingginya ketimpangan ekonomi ini menjadi ancaman serius, tidak hanya karena dapat mengakibatkan penurunan kesejahteraan bagi sebagian masyarakat, tetapi juga dapat merubah pertumbuhan ekonomi akibat hilangnya potensi pertumbuhan yang ada.

Berdasarkan gambar 1.1 tingkat ketimpangan di Provinsi Jawa Barat selama lima tahun menunjukkan bahwa Sukabumi memiliki tingkat ketimpangan yang tinggi, terutama pada tahun 2023 dengan indeks gini 0,454. Penyebabnya adalah ketergantungan pada sektor primer yang berpendapatan rendah, kurangnya akses infrastruktur dan kesenjangan dalam kepemilikan lahan. Wilayah lain seperti Bodebekpunjur dan Purwasuka juga menunjukkan perubahan ketimpangan, dengan beberapa daerah cenderung stabil. Priangan Timur mengalami peningkatan awal tetapi menurun di akhir periode. Hal ini disebabkan oleh tingkat urbanisasi yang rendah serta struktur

ekonomi yang lebih homogen. Kondisi ini menggambarkan variasi tingkat pengeluaran penduduk di Jawa Barat yang sangat beragam.



Sumber BPS Jawa Barat 2024

Gambar 1. 1
Rata-Rata Gini Ratio Antar Wilayah Pengelompokkan Jawa Barat

Wilayah Priangan Timur, yang meliputi Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar dan Pangandaran, memiliki karakteristik sosial-ekonomi yang menarik untuk diteliti, terutama dalam konteks ketimpangan ekonomi. Priangan Timur mencakup daerah pegunungan, pedesaan, dan beberapa kawasan perkotaan kecil. Keberagaman geografis ini berpengaruh pada distribusi sumber daya ekonomi serta tingkat ketimpangan di wilayah tersebut.

Priangan Timur, dibandingkan dengan daerah-daerah seperti Bandung atau Jabodetabek, cenderung berada di wilayah pinggiran. Daerah periferi seringkali menghadapi tantangan ketimpangan akibat akses yang tidak merata

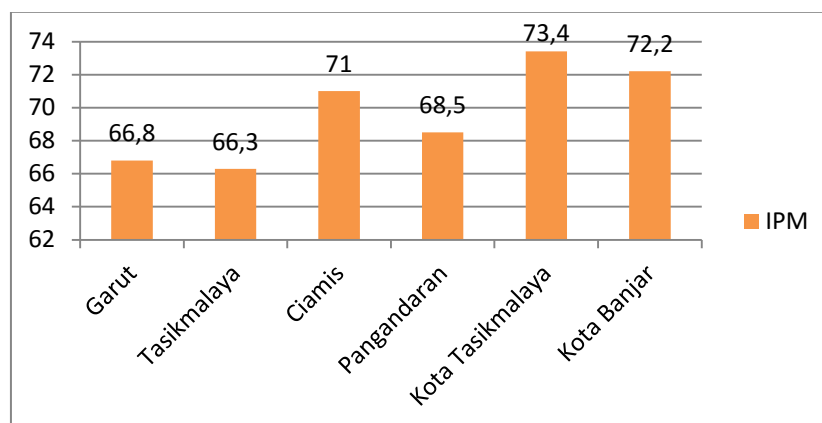
ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. sebagian besar penelitian mengenai ketimpangan ekonomi cenderung berfokus pada wilayah perkotaan yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, sementara penelitian mengenai wilayah pinggiran masih terbatas. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menganalisis ketimpangan ekonomi di wilayah Priangan Timur, yang dapat dikategorikan sebagai wilayah pinggiran dengan permasalahan ketimpangan akibat akses yang tidak merata ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, manfaat penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi pada rendahnya tingkat ketimpangan, yang dapat menjadi acuan bagi wilayah lain dengan ketimpangan tinggi. Selain itu, pemerintah dapat membuat kebijakan yang menjaga kondisi wilayah ini tidak mengalami peningkatan ketimpangan di masa depan.

IPM yang melibatkan ketimpangan pembangunan yang terjadi di suatu wilayah dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Apabila upah mencerminkan produktivitas, maka semakin banyak orang yang memiliki pendidikan tinggi, semakin tinggi produktivitas dan hasilnya ekonomi akan bertambah lebih tinggi. Teori tersebut sesuai dengan teori *human capital*, yaitu apabila pendidikan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan akan mengurangi ketimpangan pembangunan dikarenakan pendidikan berperan didalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja (Juliana & Soelistyo, 2019).

Pembangunan ekonomi dapat dikatakan berhasil apabila suatu wilayah/daerah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta

meningkatkan taraf hidup secara merata atau biasa disebut dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Kusuma et al., 2019).

Berdasarkan gambar 1.2 bahwa IPM antar kabupaten/kota di Jawa Barat khususnya wilayah Priangan Timur pada tahun 2019-2023 berbeda-beda. IPM tertinggi berada di Kota Tasikmalaya, sedangkan IPM terendah berada di Kabupaten Tasikmalaya. Nilai Indeks Pembangunan Manusia yang tinggi jika tidak diikuti dengan pemerataan pendapatan akan mengurangi kesejahteraan (Kusuma et al., 2019).



Sumber BPS Jawa Barat 2024

Gambar 1. 2
Rata-Rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Priangan Timur Tahun 2019-2023 (Persen)

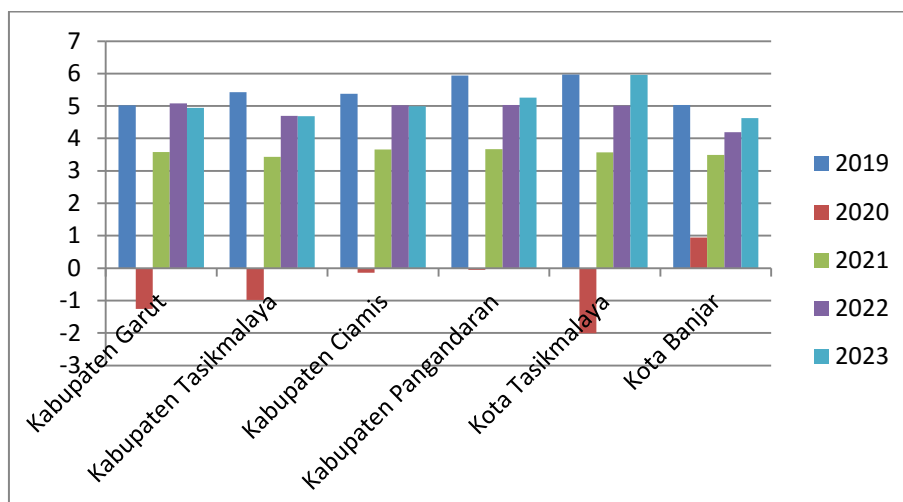
Berdasarkan teori Kuznetz (1955) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dan tingkat ketimpangan pembangunan memiliki korelasi. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan bersifat positif yang ditandai dengan grafik yang meningkat pada jangka pendek. Namun, dalam jangka panjang hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan bersifat negatif yang ditandai grafik

yang menurun. Adanya perbedaan pada jangka pendek dan jangka panjang karena pada awal fase pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh urbanisasi dan industrialisasi (Adolph, 2016b).

Laju pertumbuhan ekonomi yang lebih besar dan pemerataan pendapatan diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang cepat maka akan menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan. Hal ini dikarenakan tidak memperhatikan apakah pertumbuhan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau perubahan struktur ekonomi (Zusanti et al., 2020).

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu tolak ukur kesejahteraan masyarakat yang dapat memberikan gambaran mengenai dampak kebijakan pembangunan yang dijalankan, terutama dalam sektor ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah kecepatan pertumbuhan yang dibentuk oleh beragam sektor ekonomi yang dapat mencerminkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Secara rata-rata, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat masih berada di bawah atau lebih rendah dibandingkan capaian Nasional.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya didominasi oleh beberapa kota/kabupaten di Jawa Barat (Bekasi, Kota Bandung, dan Bogor), sedangkan kota/kabupaten lainnya hanya dapat menghasilkan sedikit pendapatan bahkan tidak sampai 50% dari pendapatan tiga wilayah tersebut (Aprianoor & Muktiali, 2015).



Sumber BPS Jawa Barat 2024

Gambar 1. 3

**Laju Pertumbuhan Ekonomi Priangan Timur, Jawa Barat
Tahun 2019-2023 (Persen)**

Pada Gambar 1.3 dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota wilayah Priangan Timur Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019-2023 memiliki perbedaan yang cukup besar. Bisa dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi terendah berada di tahun 2020 dimana tahun tersebut menunjukkan penurunan yang signifikan sampai menyentuh angka minus kecuali Kota Banjar, laju pertumbuhan ekonomi terendah pada tahun 2020 adalah Kota Tasikmalaya yaitu sebesar -2,01 (persen), berbeda jauh dengan laju pertumbuhan ekonomi Kota Banjar pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,94 (persen). Pandemi covid-19 mengganggu ekonomi global, termasuk Indonesia, dengan penurunan akibat pembatasan aktivitas permintaan domestik dan ekspor. Laju pertumbuhan ekonomi meningkat antara 2021-2023, tertinggi di Kota Tasikmalaya dan terendah di Kota Banjar. Hal itu disebabkan karena Kota Tasikmalaya dikenal sebagai pusat perdagangan di Priangan Timur. Pasar-pasarnya seperti pasar Cikurubuk merupakan sentra

aktivitas ekonomi yang melayani masyarakat dari kota dan kabupaten sekitar. Selain itu, sektor jasa termasuk pendidikan, kesehatan, dan keuangan berkembang pesat karena banyak fasilitas yang tidak tersedia di daerah sekitarnya.

Perkembangan jumlah penduduk bisa menjadi faktor pendorong dan penghambat pembangunan. Jumlah penduduk yang tidak terkendali dapat menjadi masalah bagi pemerintah. Adanya peningkatan jumlah penduduk jika tidak diimbangi dengan produktivitas, akan muncul permasalahan ketimpangan ekonomi. Laju pertumbuhan penduduk di Priangan Timur, Jawa Barat cenderung berfluktuasi dari tahun ke tahun.

Dana Perimbangan merupakan transfer dari pemerintah pusat ke daerah yang digunakan oleh pemerintah untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan mendukung pembangunan antar wilayah, terutama dalam sektor-sektor prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Dengan adanya dana ini, daerah dengan kapasitas fiskal rendah tetap bisa membiayai pembangunan, layanan publik, dan infrastruktur, sehingga ketimpangan antarwilayah bisa diminimalkan. Namun, masih terdapat tantangan dalam implementasi dana perimbangan seperti ketepatan sasaran, efisiensi penggunaan, serta transparansi pengelolaan dana.

Inovasi dari penelitian ini adalah mengkaji pengaruh laju pertumbuhan penduduk dan dana perimbangan terhadap ketimpangan ekonomi. variabel ini belum banyak diterapkan dalam penelitian sebelumnya.

Berdasarkan uraian diatas yang melatarbelakangi penelitian ini adalah untuk melihat besarnya pengaruh IPM, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Laju Pertumbuhan Penduduk , dan Dana Perimbangan terhadap Ketimpangan Ekonomi. Judul yang penulis akan terapkan dalam penelitian ini yaitu “Pengaruh IPM, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Dana Perimbangan Terhadap Ketimpangan Ekonomi di Priangan Timur, Jawa Barat Tahun 2015-2023”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh IPM, laju pertumbuhan ekonomi, laju pertumbuhan penduduk, dan dana perimbangan secara parsial terhadap ketimpangan ekonomi di Priangan Timur Tahun 2015-2023?
2. Bagaimana pengaruh IPM, laju pertumbuhan ekonomi, laju pertumbuhan penduduk, dan dana perimbangan secara bersama-sama terhadap ketimpangan ekonomi di Priangan Timur Tahun 2015-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka penelitian ini memiliki tujuan yang hendak dicapai, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh IPM, laju pertumbuhan ekonomi, laju pertumbuhan penduduk, dan dana perimbangan secara parsial terhadap ketimpangan ekonomi di Priangan Timur Tahun 2015-2023.

2. Untuk mengetahui pengaruh IPM, laju pertumbuhan ekonomi, laju pertumbuhan penduduk, dan dana perimbangan secara bersama-sama terhadap ketimpangan ekonomi di Priangan Timur Tahun 2015-2023.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

1. Bagi peneliti, sebagai sarana untuk memperluas pengetahuan dan pemahaman mengenai seberapa besar pengaruh IPM, laju pertumbuhan ekonomi, laju pertumbuhan penduduk, dan dana perimbangan terhadap ketimpangan ekonomi di Priangan Timur, Jawa Barat Tahun 2015-2023. Penelitian ini dapat memperkuat atau menguji teori ketimpangan yang sudah ada, seperti teori Kuznets, dengan menganalisis pengaruh IPM, laju pertumbuhan ekonomi, laju pertumbuhan penduduk, dan dana perimbangan. Penelitian ini juga digunakan sebagai tugas akhir untuk memenuhi syarat kelulusan.
2. Bagi akademisi, Untuk menambah literatur tentang ekonomi regional, khususnya tentang faktor-faktor yang memengaruhi ketimpangan antar wilayah di Priangan Timur serta memberikan wawasan empiris tentang dinamika ketimpangan ekonomi di Priangan Timur, yang dapat dibandingkan dengan wilayah lain.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi pemerintah, memberikan pemahaman lebih dalam tentang bagaimana faktor-faktor seperti IPM, laju pertumbuhan ekonomi, laju pertumbuhan penduduk, dan dana perimbangan saling berhubungan dan

mempengaruhi tingkat ketimpangan ekonomi di suatu wilayah. Hasil penelitian ini memberikan pandangan yang lebih jelas kepada para pengambil kebijakan dalam mengidentifikasi strategi efektif untuk mengurangi kesenjangan ekonomi.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi peneliti ini dilakukan di wilayah Priangan Timur Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini penelitian yang dilakukan yaitu dengan menggunakan data sekunder. Penulis memperoleh data tersebut dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat serta dari website resmi Kementerian Keuangan.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai dari Bulan Oktober 2024. Adapun jadwal penelitian yang akan dilakukan dapat dilihat pada tabel 1.1

Tabel 1. 1
Jadwal Penelitian

[illegible]